

## KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

## KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Majapahit No. 44 Mataram Telepon : (0370) 7856244

Laman: <a href="mailto:ntb.kemenkumham.go.id">ntb.kemenkumham.go.id</a>, Surel: <a href="mailto:kemenkumham.go.id">kemenkumham.go.id</a>, Surel: <a href="mailto:kemenkumham.go.id">kemenkumham.go.id</a>, Surel: <a href="mailto:kemenkumham.go.id">kemenkumham.go.id</a>, Surel: <a href="mailto:kemenkumham.go.id">kemenkumham.go.id</a>,

## **SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN**

Nomor: W.21-KP.12-1263 Tahun 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Romi Yudianto, S.H., M.H.
NIP : 197706261997031001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat.

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

Nama : Johan Iswara, S.Kom.
NIP : 198912292022031002
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama pada Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-15.KP.03.04 Tahun 2023 tanggal 2 Maret 2023 telah diangkat menjadi Pranata Komputer Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dan telah dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat pada tanggal 9 Maret 2023.

Demikian Surat Pernyataan Pelantikan ini saya buat dengan sesunguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi Surat Pernyataan ini ternyata tidak benar dan mengakibatkan kerugian terhadap Negara, dan saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan pelantikan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram.



Mataram, 9 Maret 2023 Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh : Romi Yudianto

Romi Yudianto NIP 197706261997031001

## Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
- 3. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM RI;
- 4. Kepala BKN (Up. Deputi Bid. Mutasi dan Deputi Bid. Informasi);
- 5. Pembuat Daftar Gaji pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB;
- 6. Yang bersangkutan.